

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam melakukan tugasnya dapat dilihat melalui laporan keuangannya yang dimana menggambarkan keuangan yang telah digunakan untuk menjalankan tugasnya. Penilaian Instansi Pemerintah tersebut terletak pada kualitas informasi pada laporan keuangan yang telah dibuat. Saat ini, pemerintah selalu berupaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga dapat mencapai tujuan dari kegiatan pemerintahan yaitu untuk menciptakan *good governance*. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dimana terjadi reformasi keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota harus dan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPR/DPRD. Laporan keuangan yang akan disusun dan diserahkan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana penyusunan serta penyajiannya harus menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pembahasan didalamnya adalah pemerintah yang mulai menggunakan basis *cash toward accrual* atau kas menuju akrual dalam

pencatatan akuntansinya, yang dimana sebelumnya masih menggunakan *single entry*. Pencatatan akuntansi secara *single entry* sudah tidak dapat digunakan oleh pemerintah karena pemerintah harus menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, maka dari itu pemerintah menggunakan sistem *double entry* dalam pencatatannya dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, wajar, lebih lengkap, dan berkualitas.

Dimulai pada tahun 2006, seluruh instansi pemerintah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Gresik diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara menyeluruh dan lengkap yang akan diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Gresik, selama tahun 2006 hingga tahun 2014 tercatat bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik pada hasil pemeriksaan laporan keuangannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau yang biasa disebut WTP, meskipun dapat dikatakan sumber daya manusia waktu itu masih dapat dikatakan belum cukup dalam mengelola administrasi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Gresik.

Selanjutnya, pemerintah berniat untuk melakukan penyempurnaan dalam Standar Akuntansi Pemerintah terutama pada laporan keuangan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua yang diharapkan dapat menyempurnakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada seluruh daerah di Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat

beberapa perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dimana perbedaannya adalah komponen pada laporan keuangan yang wajib dibuat oleh seluruh instansi pemerintah. Komponen yang dimaksud adalah Laporan Saldo Anggaran Lebih atau SiLPA/SiKPA, selanjutnya adalah Laporan Operasional, dan yang terakhir adalah Laporan Perubahan Ekuitas. Ketiga hal tersebut merupakan laporan baru yang ada setelah ditetapkannya pencatatan dan penyajian akuntansi berbasis akrual, seperti halnya pada pengakuan pendapatan dan belanja yang terlihat jelas perbedaannya antara basis *cash toward accrual* dengan basis *accrual*. Terkhusus pada laporan operasional yang berbasis akrual terdapat akun Pendapatan-LO dan terdapat juga akun Beban. Meskipun kas atau secara nyata belum diterima pada Rekening Kas Umum Negara atau R-KUN, akun Pendapatan-LO telah diakui dengan catatan sudah munculnya hak atas perolehan pendapatan. Adapun juga akun Beban pada Laporan Operasional, meskipun kas atau secara nyata belum keluar dari Rekening Kas Umum Negara atau R-KUN, Beban tersebut telah diakui waktu timbulnya kewajiban yang dapat menyebabkan penurunan nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan tinjauan atas pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD BPPKAD pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Penulis akan melakukan tinjauan pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 dan membandingkannya dengan PSAP Nomor 12 yang berfokus mengatur tentang Laporan Operasional Pemerintah. Maka dari itu, penulis telah menetapkan judul

untuk Karya Tulis Tugas Akhir yaitu “TINJAUAN ATAS KESESUAIAN LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah terkait pokok pembahasan seperti berikut:

1. Bagaimana pengakuan pos-pos atau komponen-komponen yang terdapat pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020?
2. Bagaimana pengukuran pos-pos atau komponen-komponen yang terdapat pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020?
3. Bagaimana penyajian pos-pos atau komponen-komponen yang terdapat pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020?
4. Bagaimana pengungkapan pos-pos atau komponen-komponen yang terdapat pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020?
5. Bagaimana kesesuaian antara Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 dengan Laporan Operasional dalam Standar Akuntansi Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengakuan pos-pos atau komponen-komponen yang terdapat pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020.
2. Mengetahui dan memahami pengukuran pos-pos atau komponen-komponen yang terdapat pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020.
3. Mengetahui dan memahami penyajian pos-pos atau komponen-komponen yang terdapat pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020.
4. Mengetahui dan memahami pengungkapan pos-pos atau komponen-komponen yang terdapat pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020.
5. Mengetahui dan membandingkan kesesuaian antara Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 dengan Laporan Operasional dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah penulis akan melakukan pembahasan yang berfokus pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu PSAP Nomor 12 yang mengatur khusus tentang

Laporan Operasional yang telah didapatkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gresik tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik yang telah melalui proses audit.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat sisi praktis, untuk menambah wawasan dari sisi praktik tentang ada/tidaknya perbedaan pos-pos atau komponen-komponen yang disajikan di dalam Laporan Operasional Pemerintah Daerah dengan Laporan Operasional yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah khususnya pada PSAP Nomor 12.
2. Manfaat sisi teoritis, untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca mengenai kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Laporan Operasional yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah khususnya pada PSAP Nomor 12.
3. Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas penerapan kebijakan yang terdapat dalam penyusunan Laporan Operasional dan melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap penerapannya agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah berlaku.

4. Bagi masyarakat umum, karya tulis ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan terkait bidang akuntansi khususnya pada Laporan Operasional pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Karya tulis ini juga dapat menjadi referensi bagi civitas akademika yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan diuraikan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang direncanakan akan disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menulis karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan mengungkapkan teori-teori yang berkaitan dengan digitalisasi dalam transaksi, efektivitas, penggunaan UP, dasar hukum pembayaran UP Tunai dan UP KKP, prinsip dasar pembayaran KKP sebagai landasan untuk melakukan tinjauan/evaluasi/analisis atas penelitian yang dilakukan penulis.

BAB III METODE PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini akan memuat metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan data-data terkait yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir. Pertama adalah metode studi kepustakaan. Dengan metode kepustakaan ini, penulis berupaya untuk mengumpulkan, membaca, mempelajari, memahami, dan membandingkan berbagai literatur yang telah didapat seperti Undang-Undang,

Buku Sumber, Peraturan Pemerintah, Buletin Teknis Akuntansi, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan inti dan pokok bahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini. Kedua adalah metode studi lapangan. Dengan metode studi lapangan ini, penulis mendapatkan data dari objek yang telah ditentukan secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap objek dan meminta data dari objek (berizin), terutama pada data yang berkaitan dengan Laporan Operasional (LO) dan CaLK. Pada bab ini juga akan dijabarkan mengenai profil umum dari Pemerintah Kabupaten Gresik dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), seperti visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasinya. Kemudian akan diuraikan pula pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Pembahasan hasil ini akan berisi jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis yaitu tinjauan atas kesesuaian Laporan Operasional pada Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2020 dengan standar akuntansi pemerintah dan data-data yang telah didapatkan seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2020.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab keempat ini, penulis akan menjelaskan tentang simpulan dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk perbaikan di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA